

# Pengertian, Kriteria, Bentuk Usaha, dan Pola Pengembangan Tanaman Perkebunan Utama

Dr. Ir. Ade Wachjar, M.S.



## PENDAHULUAN

---

Indonesia hingga saat ini masih tergolong negara agraris. Penduduk Indonesia bermata pencarian dari bidang pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan) selama lima tahun terakhir (2011-2015) rata-rata sebesar 34.6% dari jumlah penduduk dengan angkatan kerja berumur 15 tahun ke atas meskipun ada kecenderungan menurun terus.

Sampai saat ini dan pada masa-masa yang akan datang, subsektor perkebunan memegang peranan yang sangat penting dan merupakan bagian tulang punggung ekonomi Indonesia yang bersifat agraris. Subsektor perkebunan menghasilkan produksi, baik yang dikonsumsi di dalam negeri, seperti gula, cengkih, dan kapas, maupun yang merupakan penghasil devisa yang amat penting, seperti minyak dan inti sawit, karet, kopra, kopi, kakao, teh, lada, dan tembakau.

Kesinambungan (kontinuitas) ekspor dari hasil perkebunan relatif lebih stabil dibandingkan dengan hasil minyak dan gas bumi atau mineral yang satu waktu bisa habis atau ekspor kayu yang peremajaan hutannya memerlukan jangka waktu yang relatif sangat panjang. Kestabilan dalam kesinambungan ekspor hasil perkebunan tersebut karena hasilnya bersifat dapat diperbarui (*renewable*) dalam waktu yang relatif lebih singkat. Kestabilan dalam kesinambungan ekspor hasil perkebunan tersebut dapat dilihat dari statistik luas areal, jumlah produksi, volume, dan nilai ekspor, kecuali untuk beberapa komoditas perkebunan, seperti kopra, cengkih, dan gula, karena permasalahan yang timbul di dalam negeri yang dapat dikatakan bersifat sementara.

Sebagian besar komoditas perkebunan di Indonesia diusahakan oleh rakyat yang dikenal dengan perkebunan rakyat dan hanya sebagian kecil yang diusahakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang dikenal dengan perkebunan besar. Perbedaan dari kedua macam perkebunan tersebut adalah bentuk usaha dan sistem pengelolaan.

Pengembangan subsektor perkebunan di Indonesia dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan kestabilan dalam kesinambungan ekspor hasil perkebunan tersebut. Pengembangan subsektor perkebunan dilaksanakan melalui empat pola, yaitu perkebunan inti rakyat yang kemudian berubah menjadi perusahaan inti rakyat perkebunan (PIRBUN), unit pelaksana proyek (UPP), swadaya, dan pengembangan perkebunan swasta.

Pada Modul 1, Anda akan mempelajari pengertian perkebunan, kriteria tanaman perkebunan utama, bentuk usaha perkebunan, dan pola pengembangan perkebunan yang merupakan materi dan pengertian dasar dari budi daya tanaman perkebunan utama.

Secara umum, setelah mempelajari modul ini, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan kriteria tanaman perkebunan utama serta pengembangan tanaman perkebunan utama di Indonesia. Secara khusus, setelah mempelajari modul ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian perkebunan, kriteria tanaman perkebunan utama, bentuk usaha perkebunan, serta pola pengembangan perkebunan.

Modul 1 terdiri atas dua kegiatan belajar, yaitu Kegiatan Belajar 1 meliputi pengertian perkebunan dan kriteria tanaman perkebunan utama. Kegiatan Belajar 2 meliputi bentuk usaha perkebunan dan pola pengembangan perkebunan.

Proses pembelajaran untuk materi Modul 1 dapat berjalan dengan lebih lancar apabila Anda mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut.

1. Bacalah materi tentang pengertian perkebunan, kriteria tanaman perkebunan utama, bentuk usaha perkebunan, dan pola pengembangan perkebunan secara saksama.
2. Bacalah referensi lainnya tentang pengertian perkebunan, kriteria tanaman perkebunan utama, bentuk usaha perkebunan, dan pola pengembangan perkebunan, baik yang berasal dari buku-buku referensi maupun dari mengunduh laman-laman (situs) internet yang tersedia.

Kami berharap, Anda dapat mengikuti keseluruhan kegiatan belajar dalam modul ini dengan baik. Kami yakin Anda mampu menyelesaikan modul ini dengan baik. Selamat belajar.

**KEGIATAN BELAJAR 1****Pengertian Perkebunan dan Kriteria Tanaman Perkebunan Utama****A. PENGERTIAN PERKEBUNAN**

Berbagai pengertian dan definisi mengenai perkebunan telah banyak dikemukakan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan menyatakan bahwa perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai serta mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat. Tanaman tertentu yang dimaksud adalah tanaman semusim atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan. Pengertian perkebunan kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyatakan perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran yang terkait tanaman perkebunan.

Berdasarkan pengertian perkebunan dari kedua undang-undang tersebut, perkebunan dapat diartikan berdasarkan fungsi, pengelolaan, jenis tanaman, dan produk yang dihasilkan. Perkebunan berdasarkan fungsinya dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan devisa negara, serta pemeliharaan kelestarian sumber daya alam.

Berdasarkan pengelolaannya, perkebunan dapat dibagi menjadi perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat, yaitu suatu usaha budi daya tanaman perkebunan yang dilakukan oleh rakyat/perkebun yang hasilnya sebagian besar untuk dijual dengan area pengusaannya dalam skala luas yang terbatas.

Perkebunan besar, yaitu suatu usaha budi daya tanaman yang dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN) atau swasta yang seluruh hasilnya

dijual dengan areal pengusahaannya yang sangat luas. Selain itu, berdasarkan pengelolaan, Jones (1968) mendefinisikan perkebunan sebagai suatu unit ekonomi yang menghasilkan komoditas pertanian untuk dijual yang menghasilkan uang (*agricultural commodities for sale = cashcrops*) dan yang biasanya mempekerjakan (*employing*) sejumlah tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan (*large number of unskilled labor*) sehingga memerlukan supervisi (organisasi) yang baik dan menggunakan teknologi tinggi (*high technology*). Sebagai suatu unit ekonomi, usaha perkebunan memerlukan modal besar, berorientasi mendapatkan keuntungan, serta kegiatannya dilakukan oleh sekelompok orang (tenaga kerja) dengan menggunakan sarana dan teknologi.

Berdasarkan jenis tanamannya, perkebunan dapat diartikan sebagai usaha budi daya tanaman yang dilakukan oleh rakyat, pemerintah, ataupun swasta, selain tanaman pangan dan hortikultura. Berdasarkan produk yang dihasilkan, perkebunan dapat diartikan sebagai usaha budi daya tanaman yang ditujukan untuk menghasilkan bahan industri (misalnya karet, tembakau, cengkih, dan kapas), bahan industri makanan (misalnya kelapa dan kelapa sawit), serta industri makanan dan minuman (misalnya tebu, teh, kopi, kakao, dan kayu manis).

Pada era 1980-1990, perkebunan memiliki tujuan dan peran bagi pembangunan nasional yang termaktub dalam tridarma perkebunan yang intinya sebagai berikut: (1) menghasilkan devisa negara, (2) menyediakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja (*the agent of development*), serta (3) memelihara dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam. Pada era 2015-2019, tujuan dan peran perkebunan bagi pembangunan nasional diperluas menjadi delapan, yaitu (1) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; (2) meningkatkan sumber devisa negara; (3) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan berusaha; (4) meningkatkan produksi, produktivitas, kualitas, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar; (5) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri dalam negeri; (6) memberikan perlindungan pada usaha pelaku perkebunan dan masyarakat; (7) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab, dan lestari; serta (8) meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Berdasarkan perannya dalam pembangunan ekonomi nasional, komoditas perkebunan memiliki dua peran utama, yaitu sebagai komoditas ekspor dan sebagai komoditas sosial. Sebagai komoditas ekspor, komoditas

perkebunan merupakan sumber penghasil devisa bagi negara; sedangkan sebagai komoditas sosial, komoditas perkebunan merupakan sumber mata pencarian dan lapangan kerja bagi jutaan pekebun dan tenaga kerja di subsektor perkebunan seperti yang tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1.1

Jumlah Pekebun dan Tenaga Kerja yang Menjadikan Beberapa Komoditas Perkebunan sebagai Sumber Mata Pencarian dan Lapangan Kerja Tahun 2013

No.	Komoditas	Jumlah Pekebun (KK)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
1.	Kelapa Sawit	2.130.282	3.054.465
2.	Kelapa	6.961.688	22.659
3.	Karet	2.164.890	233.227
4.	Kakao	1.668.806	68.821
5.	Kopi	1.872.922	62.179
6.	Jambu Mete	754.222	346
7.	Cengkih	1.052.662	20.928
8.	Lada	297.747	14
9.	Teh	99.882	99.591
10.	Tebu	805.672	262.350
11.	Tembakau	527.688	9.733
12.	Kapas	16.521	-
13.	Lain-lain	404.612	-
	Jumlah	18.757.594	3.834.313

Sumber: Direktorat Jenderal Perkebunan (2014).

## B. KRITERIA TANAMAN PERKEBUNAN UTAMA

Pada tanaman yang dikelompokkan berdasarkan lamanya siklus pertumbuhan, ada tanaman semusim (*annual crop*), tanaman dua musim (*biennial crop*), dan tanaman tahunan (*perennial crop*). Pada tanaman semusim, siklus pertumbuhan vegetatif sampai pertumbuhan generatif memerlukan waktu yang relatif singkat (3-4 bulan). Setelah hasilnya dipanen, siklus pertumbuhan selesai. Untuk dapat menghasilkan lagi, diperlukan penanaman kembali. Pada tanaman dua musim, siklus pertumbuhan vegetatif sampai pertumbuhan generatif memerlukan waktu yang relatif singkat, tetapi pemanenannya dilakukan berulang-ulang secara berkala sampai selesai sehingga umur tanaman menjadi relatif lebih panjang (4-5 bulan). Pada tanaman tahunan, siklus pertumbuhan vegetatif sampai pertumbuhan generatif memerlukan waktu relatif lama (2-8 tahun). Setelah pertumbuhan

generatif tercapai, pemanenan dilakukan berulang-ulang secara berkala dalam jangka waktu tahunan. Selama itu, pertumbuhan vegetatif dan pertumbuhan generatif selalu terjadi pada siklus yang bergantian.

Pengelompokan tanaman juga dapat berdasarkan fungsional, yaitu sifat dan kegunaannya. Pada kelompok ini, terdapat tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. Tanaman pangan, terutama untuk memenuhi kebutuhan konsumsi makanan (pangan), hasilnya relatif tahan lama disimpan. Tanaman hortikultura, terutama untuk memenuhi kebutuhan sumber vitamin dan mineral, dipanen dan dimanfaatkan dalam keadaan hidup dan segar sehingga produknya bersifat mudah rusak (*perishable*) dan bersifat meruah (*voluminous, bulky*). Tanaman perkebunan, terutama untuk memenuhi tujuan ekspor, relatif dapat tahan lama disimpan sebagai bahan baku industri.

Pengelompokan komoditas perkebunan yang biasanya berdasarkan jenis produk yang dihasilkan atau kegunaannya adalah tanaman penghasil minyak (*oil crop*), contohnya kelapa, kelapa sawit; tanaman penyegar (*beverage crop*), contohnya kopi, kakao, teh; tanaman rempah (*spice crop*), contohnya lada, pala, kayu manis; serta tanaman pemanis (*sweetener crop*), contohnya tebu. Pengelompokan komoditas perkebunan ke dalam tanaman perkebunan utama atau bukan utama belum ada kriterianya. Akan tetapi, dari pengalaman bertahun-tahun, pengelompokan tersebut dapat dilakukan berdasarkan angka statistik dari komoditas tersebut. Pada era tahun 1980-an, tiga komoditas perkebunan tergolong yang utama berdasarkan luas areal, produksi, volume dan nilai ekspor, serta jumlah pekebun yang mengusahakan komoditas tersebut. Ketiga komoditas tersebut adalah kelapa, karet, dan kelapa sawit (Tabel 1.2). Posisi ketiga komoditas tersebut sebagai komoditas perkebunan utama tetap bertahan hingga tahun 2013.

Apabila dilihat dari nilai ekspor, komoditas kelapa nilai eksportnya paling rendah dibandingkan komoditas lain (Tabel 1.3). Hal tersebut disebabkan produk kelapa yang diekspor sedikit dan harga ekspor produk kelapa juga rendah. Pada tahun 2013, meskipun luas areal, produksi, dan volume ekspor komoditas kelapa ditingkatkan, tetapi nilai eksportnya tetap lebih rendah dibandingkan komoditas kopi dan kakao. Pada masa yang akan datang, untuk meningkatkan harga ekspor, perlu ada perubahan produk kelapa yang diekspor, bukan lagi dalam bentuk bungkil kelapa dan minyak, tetapi dapat dalam bentuk antara lain *dessicated coconut (low fat)*, *virgin oil*, arang tempurung (arang aktif), dan minuman air kelapa (*nata de coco*).

Tabel 1.2  
Luas Areal dan Produksi Beberapa Tanaman Perkebunan di Indonesia pada Tahun 1984 dan 2013

No.	Komoditas	1984 <sup>1)</sup>		2013 <sup>2)</sup>	
		Luas Areal (ha)	Produksi (ton)	Luas Areal (ha)	Produksi (ton)
1.	Kelapa Sawit	498 988	1 394 301	10 465 020	33 338 405 <sup>3)</sup>
2.	Kelapa	2 971 195	1 749 634	3 654 478	3 051 585
3.	Karet	2 650 301	1 032 569	3 555 946	3 237 433
4.	Kakao	75 140	26 616	1 740 612	720 862
5.	Kopi	834 979	315 333	1 241 712	675 881
6.	Jambu Mete	197 788	19 388	554 315	116 113
7.	Cengkih	611 624	49 348	501 378	109 694
8.	Lada	79 014	45 634	171 920	91 039
9.	Teh	120 525	125 515	122 035	145 460
10.	Jarak Pagar	1 747	508	38 037	4 821
11.	Kemiri Sunan	-	-	1 057	0
12.	Tebu	400 356	1 809 559	469 227	2 551 026
13.	Tembakau	200 044	108 419	192 809	164 448
14.	Kapas	31 922	19 892	8 738	1 871
15.	Nilam	-	-	28 226	2 082
	Jumlah	8 673 623	6 696 716	22 590 610	44 210 720

Sumber: <sup>1)</sup> Direktorat Jenderal Perkebunan (1986).

<sup>2)</sup> Direktorat Jenderal Perkebunan (2015).

<sup>3)</sup> Minyak dan Inti Sawit

- : Tidak ada data

Tabel 1.3  
Volume dan Nilai Ekspor Beberapa Tanaman Perkebunan di Indonesia pada Tahun 1984 dan 2013

No.	Komoditas	1984 <sup>1)</sup>		2013 <sup>2)</sup>	
		Volume Ekspor (ton)	Nilai Ekspor (US\$000)	Volume Ekspor (ton)	Nilai Ekspor (US\$000)
1.	Karet	1 122 000	958 212	2 701 995	6 906 952
2.	Kelapa Sawit	166 100	78 147	22 222 508	17 140 435 <sup>3)</sup>
3.	Kelapa	227 700	31 719	1 295 442	762 413
4.	Kopi	312 700	575 535	534 023	1 174 029
5.	Kakao	24 800	51 613	414 092	1 151 494
6.	Lada	38 900	64 919	47 908	346 976
7.	Teh	95 800	226 644	70 840	157 498
8.	Tembakau	23 000	44 629	41 765	199 589



No.	Komoditas	1984 <sup>1)</sup>		2013 <sup>2)</sup>	
		Volume Ekspor (ton)	Nilai Ekspor (US\$000)	Volume Ekspor (ton)	Nilai Ekspor (US\$000)
9.	Lain-lain	38 900	48 399	626 631	236 697
	Jumlah	2 049 900	2 079 817	27 955 204	28 076 083

Sumber: <sup>1)</sup> Direktorat Jenderal Perkebunan (1986).

<sup>2)</sup> Direktorat Jenderal Perkebunan (2014).

<sup>3)</sup> Minyak dan Inti Sawit.



## LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Jelaskan yang dimaksud dengan perkebunan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014!
- 2) Sebutkan ciri-ciri perkebunan sebagai suatu unit ekonomi!
- 3) Jelaskan alasan komoditas perkebunan selain disebut komoditas ekspor, juga disebut komoditas sosial!
- 4) Jelaskan yang menjadi dasar pengelompokan komoditas perkebunan menjadi komoditas perkebunan utama!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

Anda harus mempelajari uraian materi Kegiatan Belajar 1 Modul 1 tentang pengertian perkebunan dan kriteria tanaman perkebunan utama.



## RANGKUMAN

Subsektor perkebunan memegang peranan yang sangat penting dan merupakan bagian tulang punggung ekonomi Indonesia yang bersifat agraris.

Pengertian perkebunan, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014, adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran, terkait tanaman perkebunan.

Tujuan dan peran perkebunan bagi pembangunan nasional termaktub dalam tridarma perkebunan, yaitu (1) menghasilkan devisa negara, (2) menyediakan dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan kerja (*the agent of development*), serta (3) memelihara dan mempertahankan kelestarian sumber daya alam. Tridarma perkebunan diperluas menjadi delapan tujuan/peran.

Pengelompokan komoditas perkebunan yang lazim biasanya berdasarkan jenis produk yang dihasilkan atau kegunaannya, yaitu tanaman penghasil minyak (*oil crop*), tanaman penyegar (*beverage crop*), tanaman rempah (*spice crop*), dan tanaman pemanis (*sweetener crop*). Pengelompokan komoditas perkebunan utama juga dilihat berdasarkan luas areal, produksi, volume dan nilai ekspor, serta jumlah pekebun yang mengusahakan komoditas tersebut.



#### TES FORMATIF 1 \_\_\_\_\_

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Indonesia termasuk negara agraris. Hal ini disebabkan mata pencarian sebagian besar penduduknya di bidang ....
  - A. pertanian
  - B. industri
  - C. pertambangan
  - D. perminyakan
  
- 2) Hasil perkebunan relatif lebih stabil dibandingkan dengan hasil minyak dan gas bumi, mineral, atau kayu sebagai hasil hutan. Hal ini disebabkan ....
  - A. hasil perkebunan tidak pernah menyusut meskipun tanamannya sudah tua dan tidak produktif
  - B. hasil perkebunan dapat diperoleh terus-menerus sampai tanamannya mati
  - C. hasil perkebunan bersifat dapat diperbarui (*renewable*) dalam waktu yang relatif lebih singkat melalui peremajaan
  - D. areal perkebunan sangat luas
  
- 3) Pengelompokan usaha tanaman perkebunan menjadi perkebunan rakyat dan perkebunan besar didasarkan atas ....
  - A. siklus pertumbuhan
  - B. produk yang dihasilkan

- C. sifat produk dan kegunaan
  - D. bentuk usaha dan sistem pengelolaan
- 4) Pengelompokan tanaman perkebunan menjadi tanaman penghasil minyak, tanaman penyegar, tanaman rempah, dan tanaman pemanis didasarkan atas ....
- A. siklus pertumbuhan
  - B. jenis produk yang dihasilkan
  - C. sifat produknya
  - D. bentuk usaha dan sistem pengelolaan
- 5) Sebagai suatu unit ekonomi, perkebunan memiliki ciri, yaitu ....
- A. memerlukan modal kecil
  - B. kegiatan dilakukan oleh perorangan
  - C. berorientasi mendapatkan keuntungan
  - D. menggunakan sarana dan teknologi sederhana

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 1 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 1.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan Kegiatan Belajar 2. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 1, terutama bagian yang belum dikuasai.

## KEGIATAN BELAJAR 2

## Bentuk Usaha dan Pola Pengembangan Perkebunan

### A. BENTUK USAHA PERKEBUNAN

Berdasarkan bentuk usaha dan sistem pengelolaan, perkebunan dapat dibedakan atas dua bagian.

1. Perkebunan rakyat dengan ciri-ciri luas tanah yang diusahakan kecil-kecil ( $\leq 2$  ha) dan maksimal 25 ha di atas tanah milik atau tanah adat, tingkat teknologi sederhana, dan umumnya masih berada pada taraf subsisten (*subsistence*).
2. Perkebunan besar dengan ciri-ciri luas tanah di atas 25 ha sampai dengan puluhan ribu hektare, pengusaannya berbentuk badan hukum (perseroan terbatas), di atas tanah berbentuk hak guna usaha (HGU), diusahakan dengan prinsip manajemen perusahaan, menggunakan teknologi maju, menggunakan tenaga kerja (buruh) tetap, dan berorientasi bisnis (*bussiness oriented*).

Perkebunan besar dibagi menjadi berikut ini.

- a. Perkebunan besar negara (PBN), yaitu seluruhnya berbentuk perseroan terbatas dengan nama Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN). Jumlahnya saat ini ada 14 PTPN yang tersebar mulai dari Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi.
- b. Perkebunan besar swasta (PBS) terbagi atas perkebunan besar swasta nasional dan perkebunan besar swasta asing.

Menurut data statistik perkebunan, pada tahun 2013 dari luas areal tanaman perkebunan 22.6 juta ha, sebanyak 15.8 juta ha (70%) merupakan perkebunan rakyat, sedangkan 6.8 juta ha (30%) merupakan perkebunan besar (negara dan swasta). Perkebunan besar, terutama perkebunan besar negara, mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan perkebunan rakyat. Beberapa di antaranya sebagai berikut.

1. Kondisi fisik kebun umumnya baik dan telah memanfaatkan dan menerapkan berbagai teknologi yang lebih maju, seperti penggunaan bibit unggul dan penggunaan *input* baru, yaitu pupuk dan pestisida.
2. Skala usaha yang cukup besar sehingga dapat memanfaatkan konsep perilaku biaya per unit yang semakin menurun pada skala besar.
3. Terkait dengan skala usaha tersebut, perkebunan besar dapat mempunyai unit pengolahan sendiri dengan kapasitas pada skala ekonomis sekaligus dapat membiayai manajer-manajer yang profesional.
4. Sebaliknya, sifat pembiayaan pada perkebunan besar lebih kaku (*rigid*) karena komponen biaya tetap (upah tenaga kerja tetap, biaya umum, dan penyusutan) merupakan bagian yang terbesar. Sebaliknya, komponen biaya pada perkebunan rakyat hanya sebagian kecil yang merupakan pengeluaran (*out of the pocket cost*) sehingga lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan harga jual dibandingkan perkebunan besar.
5. Pada dasarnya, pasar internasional komoditas perkebunan adalah pasar yang terorganisasi (*organized market*) sehingga perkebunan besar lebih mempunyai kemampuan untuk memasuki pasar tersebut.

Perkebunan rakyat beserta pekebun mempunyai berbagai kondisi yang antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut.

1. Lokasinya tersebar dalam bentuk kantong-kantong produksi menurut wilayah penyebaran penduduk. Hal ini dapat memberikan kondisi yang kurang menguntungkan, seperti biaya distribusi *input* produksi (pupuk dan pestisida), biaya pembinaan, serta biaya pasar pengumpul dan transportasi lebih mahal.
2. Keadaan fisik kebun masih jauh ketinggalan karena tanaman banyak yang tua serta kurang menerapkan teknologi baru yang berkaitan dengan tingkat pendidikan pekebun yang rendah, di samping kekurangan modal. Keseluruhannya menyebabkan produktivitas rendah sehingga pendapatan yang diterima pekebun kurang mencukupi, apalagi untuk mengadakan investasi baru. Kondisi demikian menyebabkan kurang memungkinkan pekebun untuk memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan oleh pihak perbankan.
3. Oleh karena skala usaha yang kecil-kecil, perkebunan rakyat tidak memanfaatkan skala ekonomis yang menguntungkan, seperti pada perkebunan besar. Akan tetapi, perkebunan rakyat mempunyai

keunggulan dari segi biaya karena dapat melakukan kegiatan usaha dengan biaya yang fleksibel.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkebunan besar melakukan kegiatan usahanya dengan manajemen modern dan dapat memanfaatkan skala ekonomis. Akan tetapi, perkebunan rakyat mempunyai fleksibilitas yang lebih tinggi, apalagi dengan mengusahakan usaha tani campuran sehingga mempunyai syarat ketangguhan yang lebih tinggi.

## **B. POLA PENGEMBANGAN PERKEBUNAN**

Pengembangan perkebunan dilaksanakan melalui pola berikut:

1. perusahaan inti rakyat (PIR),
2. unit pelaksana proyek (UPP),
3. swadaya,
4. pengembangan perkebunan besar swasta.

### **1. Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR)**

Perusahaan inti rakyat (*nucleous estate smallholders/NES*) adalah pola untuk mewujudkan suatu perpaduan usaha dengan sasaran perbaikan keadaan sosial ekonomi peserta dan didukung oleh suatu sistem pengelolaan usaha dengan memadukan berbagai kegiatan produksi, pengelolaan, dan pemasaran yang menggunakan perusahaan besar sebagai inti dalam sistem kerja sama yang saling menguntungkan. Pada pola PIR, pelaksanaannya memanfaatkan perkebunan besar milik negara dan swasta sebagai inti pengembangan perkebunan rakyat dan dilaksanakan pada areal bukaan baru. Pada pola ini, perusahaan inti, di samping mengusahakan kebunnya sendiri, berkewajiban membantu petani peserta dalam membangun kebunnya dengan teknologi maju, pengolahan, dan pemasaran hasil. Oleh karena itu, terdapat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan inti dan petani plasma.

Kewajiban dari perusahaan inti sebagai berikut.

- a. Membangun perkebunan inti lengkap dengan fasilitas pengolahan yang dapat menampung hasil perkebunan inti dan plasma.
- b. Melaksanakan pembangunan kebun plasma sesuai dengan standar operasional yang telah diatur.
- c. Bertindak sebagai pelaksana penyiapan fasilitas umum.

- d. Membina petani agar mampu mengusahakan kebunnya dengan baik.
- e. Membeli hasil kebun plasma.

Kewajiban petani plasma sebagai berikut.

- a. Melaksanakan pemeliharaan dan pengusahaan kebunnya sesuai dengan standar operasional yang telah diatur oleh perusahaan inti.
- b. Menjual hasil produksi kebun plasmanya kepada perusahaan inti.

Dalam pola PIR ini, terdapat ketentuan-ketentuan, yaitu (a) kredit lunak jangka panjang (10-20 tahun), (b) petani peserta menerima kebun siap panen untuk langsung dikelola sendiri, serta (c) tidak ada ganti rugi. Dilihat dari segi dana, peserta proyek, dan sasarannya, pola PIR dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu PIR lokal, PIR khusus, dan PIR berbantuan.

Program pengembangan perkebunan, selain melalui pola PIR, juga telah dilaksanakan melalui pola-pola kemitraan yang lain, antara lain dengan pola kredit koperasi primer untuk anggota (KKPA). Pola ini bertujuan sama, yaitu meningkatkan produksi nonmigas, meningkatkan pendapatan pekebun, membantu pengembangan wilayah dan menunjang pengembangan perkebunan, serta meningkatkan dan memberdayakan koperasi unit desa di wilayah plasma.

Dalam hubungannya dengan pengembangan perkebunan rakyat, juga pernah dilakukan program kemitraan dan program revitalisasi perkebunan. Program kemitraan adalah program yang mewajibkan setiap pengembangan kebun baru serta pihak investor untuk ikut mengembangkan 20% dari luas lahannya pada perkebunan rakyat. Sementara itu, program revitalisasi perkebunan merupakan kegiatan untuk perkebunan rakyat, baik itu perluasan (penanaman baru), peremajaan, maupun rehabilitasi untuk komoditas karet, kelapa sawit, dan kakao. Dalam program ini, petani mendapat keringanan bunga bank, yaitu hanya sebesar 6% per tahun.

## **2. Pola Unit Pelaksana Proyek (UPP)**

Konsepsi pola unit pelaksana proyek (*project management unit/PMU*) dilaksanakan melalui UPP PRPTE (perluasan, rehabilitasi, dan peremajaan tanaman ekspor) dan UPP berbantuan serta UPP intensifikasi berbagai tanaman perkebunan.

a. *UPP PRPTE dan UPP berbantuan*

Konsepsi pola UPP PRPTE dan UPP berbantuan dimaksudkan untuk menjangkau perkebunan yang sudah ada dengan lokasi yang sangat tersebar. Petani peserta proyek dibantu oleh unit pelaksana proyek dalam membangun kebunnya dengan teknologi maju, kemudian diarahkan agar petani tersebut mengorganisasi diri dalam bentuk kelembagaan petani. Dengan upaya ini, diharapkan petani dapat membangun kebunnya, kemudian mengelola usaha taninya secara kontinu dan menguntungkan sehingga menjadi petani yang mandiri. Dengan demikian, secara singkat, dapat dikatakan bahwa konsep pola UPP cukup mendasar karena hal berikut.

- 1) Diarahkan pada perkebunan yang sudah ada yang selama ini telah berperan di dalam pendapatan devisa nonmigas.
- 2) Secara massal, hal tersebut mendidik petani ke arah bentuk usaha tani yang berciri modern, memenuhi persyaratan bank teknis, dan adanya produktivitas yang semakin meningkat.
- 3) Dari tahun ke tahun, jumlah petani yang dijangkau meningkat.
- 4) Petani dibina dan dibimbing UPP mencapai konversi serta mengangsur utangnya sampai lunas.

Dengan pola ini, pada hakikatnya ingin dijangkau asas pemerataan yang dengan sendirinya akan diikuti adanya pertumbuhan sejalan dengan meningkatnya produktivitas.

b. *UPP intensifikasi*

Dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, sekaligus peningkatan pendapatan selain dilaksanakan melalui pola UPP PRPTE dan UPP berbantuan juga dilaksanakan dengan pola UPP intensifikasi. Pada pola ini, kegiatan intensifikasi pada berbagai tanaman perkebunan semakin ditingkatkan dan diperluas jangkauannya. Penyelenggaraan intensifikasi dilakukan dengan menerapkan pola kerja yang mengatur dan membina kegiatan dari perangkat kelembagaan di bidang penyuluhan perkreditan, penyaluran sarana produksi, serta pengolahan dan pemasaran hasil. Oleh karena itu, pada intensifikasi tanaman perkebunan, untuk tanaman semusim, selalu terkait dengan perusahaan pengelola.

Setelah program pengembangan perkebunan melalui pola unit pelaksana proyek ini berakhir, nama unit pelaksana proyek berganti menjadi unit pelaksana pengembangan.



### 3. Pola Swadaya

Pola PIR, pola UPP, dan intensifikasi pada dasarnya merupakan pola pembinaan dengan paket lengkap serta wilayah pembinaan dan petani pesertanya cukup jelas. Untuk membina petani perkebunan di luar wilayah ketiga pola tersebut, dilaksanakan pembinaan pola swadaya dengan kegiatan parsial dalam bentuk penyuluhan, percontohan, pembinaan, dan penyaluran bibit.

Kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pola swadaya adalah kegiatan yang merupakan kunci bagi pengembangan berdasarkan pengamatan melalui faktor penentu (*impact point*). Dengan demikian, faktor-faktor lain sudah dimiliki oleh masyarakat tani setempat atau sudah diadakan kelembagaan lain, baik lembaga sosial, lembaga ekonomi masyarakat, maupun kegiatan sektor lain, termasuk kegiatan pemerintah daerah.

Atas dasar konsepsi tersebut, keberhasilan pola swadaya ditentukan oleh tersedianya faktor-faktor atau unsur-unsur lain sehingga pada hakikatnya pola swadaya tidak dapat mencapai tujuannya sendiri, tanpa dukungan atau kerja sama dengan komponen-komponen lain. Pola swadaya dapat juga merupakan pengikat dan penggerak berbagai komponen yang telah tersedia setempat.

### 4. Pola Pengembangan Perkebunan Besar Swasta

Pada pola ini, tujuan utama adalah meningkatkan peranan perkebunan besar swasta dalam melayani para investor melalui berbagai sarana pengaturan. Untuk itu, telah dikeluarkan berbagai landasan hukum, baik berupa instruksi presiden, surat keputusan menteri pertanian, maupun surat keputusan menteri dalam negeri, yang semuanya itu untuk memfasilitasi, mengatur, dan mempermudah para investor dalam menanamkan modalnya di subsektor perkebunan.



#### LATIHAN

---

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut!

- 1) Selain dari bentuk usaha dan sistem pengelolaan, sebutkan hal-hal lain yang membedakan antara perkebunan rakyat dan perkebunan besar!
- 2) Jelaskan alasan perkebunan rakyat lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan harga jual dibandingkan perkebunan besar!

- 3) Dilihat dari pola kemitraan, jelaskan pola pengembangan perkebunan yang menganut pola kemitraan!
- 4) Pada pengembangan perkebunan pola PIR, ada kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh perusahaan inti maupun petani plasma. Jelaskan Apa saja kewajiban-kewajiban tersebut!

### *Petunjuk Jawaban Latihan*

Anda harus mempelajari uraian materi Kegiatan Belajar 2 Modul 1 tentang bentuk usaha dan pola pengembangan perkebunan.



## RANGKUMAN

---

Berdasarkan bentuk usaha dan sistem pengelolaan, perkebunan dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan besar dibagi menjadi dua, yaitu perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta. Perkebunan besar swasta terdiri atas perkebunan besar swasta nasional dan perkebunan swasta asing.

Perkebunan rakyat dan perkebunan besar dapat dibedakan berdasarkan luas tanah, status kepemilikan tanah, tingkat teknologi, prinsip manajemen, penggunaan tenaga kerja, orientasi usaha, dan badan hukum.

Pengembangan perkebunan dilaksanakan melalui empat pola, yaitu (1) perusahaan inti rakyat (PIR), (2) unit pelaksana proyek (UPP), (3) swadaya, dan (4) pengembangan perkebunan besar swasta.

Pola PIR merupakan pola pengembangan perkebunan dengan sistem kemitraan antara perusahaan inti dan petani plasma dalam sistem kerja sama yang saling menguntungkan. Perusahaan inti dan petani plasma masing-masing mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan guna mencapai tujuan saling menguntungkan.



TES FORMATIF 2

---

Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

- 1) Ciri bentuk usaha dan sistem pengelolaan perkebunan rakyat adalah ....
  - A. berorientasi bisnis (*bussiness oriented*)
  - B. status tanah hak guna usaha
  - C. menggunakan teknologi maju
  - D. luas tanah yang diusahakan sempit ( $\leq 2$  ha)
  
- 2) Pengusahaan komoditas perkebunan di Indonesia didominasi oleh ....
  - A. perkebunan besar swasta asing
  - B. perkebunan besar swasta nasional
  - C. perkebunan rakyat
  - D. perkebunan besar negara
  
- 3) Kelemahan perkebunan besar dalam mengelola perkebunan adalah ....
  - A. lokasi kebun tersebar dalam bentuk kantong-kantong produksi
  - B. kurang mampu menghadapi gejolak perubahan harga jual
  - C. kondisi fisik kebun umumnya kurang baik karena tanaman banyak yang tua
  - D. tidak mempunyai kemampuan untuk memasuki pasar internasional
  
- 4) Pola pengembangan perkebunan yang diselenggarakan dengan sistem kemitraan, yaitu ....
  - A. PIR
  - B. UPP
  - C. swadaya
  - D. pengembangan perkebunan besar swasta
  
- 5) Berikut ini merupakan kewajiban perusahaan inti dalam pengembangan perkebunan pola PIR, *kecuali* ....
  - A. membangun perkebunan inti dan fasilitas pengolahan
  - B. melaksanakan pemeliharaan kebun plasma sesuai dengan standar operasional
  - C. membangun kebun plasma
  - D. membina petani peserta

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif 2 yang terdapat di bagian akhir modul ini. Hitunglah jawaban yang benar. Kemudian, gunakan rumus berikut untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda terhadap materi Kegiatan Belajar 2.

$$\text{Tingkat penguasaan} = \frac{\text{Jumlah Jawaban yang Benar}}{\text{Jumlah Soal}} \times 100\%$$

Arti tingkat penguasaan: 90 - 100% = baik sekali

80 - 89% = baik

70 - 79% = cukup

< 70% = kurang

Apabila mencapai tingkat penguasaan 80% atau lebih, Anda dapat meneruskan dengan modul selanjutnya. **Bagus!** Jika masih di bawah 80%, Anda harus mengulangi materi Kegiatan Belajar 2, terutama bagian yang belum dikuasai.

## Kunci Jawaban Tes Formatif

### *Tes Formatif 1*

- 1) A
  - A. Jawaban benar karena mata pencarian sebagian besar penduduk Indonesia di bidang pertanian.
  - B. Jawaban salah karena industri bukan mata pencarian sebagian besar penduduk Indonesia.
  - C. Jawaban salah karena pertambangan bukan mata pencarian sebagian besar penduduk Indonesia.
  - D. Jawaban salah karena perminyakan bukan mata pencarian sebagian besar penduduk Indonesia.
- 2) C
  - A. Jawaban salah karena hasil perkebunan bisa menyusut apabila tanaman sudah tua.
  - B. Jawaban salah karena hasil perkebunan tidak dapat diperoleh terus-menerus.
  - C. Jawaban benar karena hasil perkebunan bersifat dapat diperbarui (*renewable*) dalam waktu yang relatif lebih singkat melalui peremajaan.
  - D. Jawaban salah karena areal perkebunan yang luas tidak menjamin hasil perkebunan banyak.
- 3) D
  - A. Jawaban salah karena siklus pertumbuhan bukan merupakan dasar pengelompokan usaha tanaman perkebunan.
  - B. Jawaban salah karena produk yang dihasilkan bukan merupakan dasar pengelompokan usaha tanaman perkebunan.
  - C. Jawaban salah karena sifat produk dan kegunaan bukan merupakan dasar pengelompokan usaha tanaman perkebunan.
  - D. Jawaban benar karena bentuk usaha dan sistem pengelolaan bukan merupakan dasar pengelompokan usaha tanaman perkebunan.

- 4) B
- A. Jawaban salah karena siklus pertumbuhan bukan merupakan dasar pengelompokan tanaman menjadi tanaman penghasil minyak, tanaman penyegar, tanaman rempah, dan tanaman pemanis.
  - B. Jawaban benar karena jenis produk yang dihasilkan merupakan dasar pengelompokan tanaman menjadi tanaman penghasil minyak, tanaman penyegar, tanaman rempah, dan tanaman pemanis.
  - C. Jawaban salah karena sifat produk bukan merupakan dasar pengelompokan tanaman menjadi tanaman penghasil minyak, tanaman penyegar, tanaman rempah, dan tanaman pemanis.
  - D. Jawaban salah karena bentuk usaha dan sistem pengelolaan bukan merupakan dasar pengelompokan tanaman menjadi tanaman penghasil minyak, tanaman penyegar, tanaman rempah, dan tanaman pemanis.
- 5) C
- A. Jawaban salah karena seharusnya memerlukan modal besar.
  - B. Jawaban salah karena seharusnya kegiatannya dilakukan oleh sekelompok orang.
  - C. Jawaban benar karena berorientasi mendapatkan keuntungan.
  - D. Jawaban salah karena menggunakan sarana dan teknologi yang tidak sederhana.

### *Tes Formatif 2*

- 1) D
- A. Jawaban salah karena berorientasi bisnis merupakan ciri perkebunan besar.
  - B. Jawaban salah karena seharusnya ciri perkebunan rakyat berdiri di atas tanah milik atau adat.
  - C. Jawaban salah karena seharusnya ciri perkebunan rakyat menggunakan teknologi sederhana.
  - D. Jawaban benar karena salah satu ciri perkebunan rakyat adalah luas tanah yang diusahakan sempit ( $\leq 2$  ha).
- 2) C
- A. Jawaban salah karena komoditas perkebunan di Indonesia bukan didominasi oleh perkebunan besar swasta asing.
  - B. Jawaban salah karena komoditas perkebunan di Indonesia bukan didominasi oleh perkebunan besar swasta nasional.

- C. Jawaban benar karena komoditas perkebunan di Indonesia didominasi oleh perkebunan rakyat.
  - D. Jawaban salah karena komoditas perkebunan di Indonesia bukan didominasi oleh perkebunan besar negara.
- 3) B
- A. Jawaban salah karena lokasi kebun tersebar dalam bentuk kantong-kantong produksi merupakan kelemahan dari perkebunan rakyat.
  - B. Jawaban benar karena kelemahan perkebunan besar adalah kurang mampu menghadapi gejolak perubahan harga jual.
  - C. Jawaban salah karena kondisi fisik kebun umumnya kurang baik sebab tanaman banyak yang tua dan hal itu merupakan kelemahan perkebunan rakyat.
  - D. Jawaban salah karena perkebunan besar mempunyai kemampuan untuk memasuki pasar internasional.
- 4) A
- A. Jawaban benar karena pola pengembangan perkebunan dengan sistem kemitraan adalah PIR.
  - B. Jawaban salah karena UPP bukan merupakan pola pengembangan perkebunan yang diselenggarakan dengan sistem kemitraan.
  - C. Jawaban salah karena swadaya bukan merupakan pola pengembangan perkebunan yang diselenggarakan dengan sistem kemitraan.
  - D. Jawaban salah karena pengembangan perkebunan besar swasta bukan merupakan pola pengembangan perkebunan yang diselenggarakan dengan sistem kemitraan.
- 5) B
- A. Jawaban benar karena membangun perkebunan inti dan fasilitas pengolahan merupakan kewajiban perusahaan inti dalam pengembangan perkebunan pola PIR.
  - B. Jawaban salah karena seharusnya pelaksanaan pembangunan kebun plasma sesuai dengan standar operasional.
  - C. Jawaban benar karena membangun kebun plasma merupakan kewajiban perusahaan inti dalam pengembangan perkebunan pola PIR.
  - D. Jawaban benar karena membina petani peserta merupakan kewajiban perusahaan inti dalam pengembangan perkebunan pola PIR.

## Daftar Pustaka

- Badrun, M. 2010. *Tonggak Perubahan Melalui PIR Kelapa Sawit Membangun Negeri*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Perkebunan. 2015. *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perkebunan Tahun 2015—2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015: Kelapa Sawit*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.
- \_\_\_\_\_. 2014. *Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015: Karet*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.
- \_\_\_\_\_. 1986. “Kebijaksanaan Pembangunan Perkebunan di Masa Lalu, Masa Kini, dan Masa Mendatang,” makalah disampaikan pada Seminar Keprofesian Himpunan Mahasiswa Agronomi, IPB, 22 November 1986.
- \_\_\_\_\_. 1986. *Statistik Perkebunan Indonesia 2013-2015: Kelapa Sawit*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perkebunan.
- Harijadi, S.S. 1989. *Dasar-dasar Hortikultura*. Bogor: Jurusan Budi Daya Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Wachjar, A., dan S. Yahya. 1987. *Teknologi dan Pengembangan Tanaman Perkebunan*. Bogor: Jurusan Budi Daya Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.